

Judul : Wacana pemerintah bangun 10 kampus baru jadi perdebatan
Tanggal : Sabtu, 21 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Wacana Pemerintah Bangun 10 Kampus Baru Jadi Perdebatan

Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun sepuluh perguruan tinggi baru tahun ini menjadi perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan dan legislatif. Di satu sisi, langkah Pemerintah ini dinilai bentuk kepedulian meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Namun di sisi lain, pemerataan akses dan kesejahteraan dosen dinilai lebih dibutuhkan. Sebelumnya, Prabowo menargetkan membangun 10 universitas baru pada tahun ini. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan. "Tahun ini kita akan mulai

membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan," ucap Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026). Prabowo menjelaskan, pembangunan perguruan tinggi tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil melalui regenerasi aparatur negara. Dia menekankan kepastian hukum dan pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan suatu negara. "Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan

ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil," ujarnya. Selain itu, Prabowo menegaskan, Pemerintah akan melakukan pembaruan birokrasi, termasuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkinerja baik atau melanggar aturan. Dia bilang, telah memberi kewenangan kepada sejumlah lembaga untuk melakukan evaluasi dan penggantian pejabat sesuai kebutuhan. "Saya perintahkan kepada (BPI) Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri kementerian dan lembaga, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-

pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar," kata Prabowo. Menanggapi rencana Prabowo tersebut, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyambut baik perhatian Presiden terhadap sektor pendidikan tinggi. Dia menilai, tim pelaksana di lapangan harus bertindak cermat dan hati-hati. "Realisasinya harus matang, apakah lewat akuisisi, merger, atau mendirikan baru, mengingat jumlah kampus kita sudah sangat banyak," ujar Fikri kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/2/2026). Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Perhimpunan Pendidikan

dan Guru (P2G) Feriyansyah menekankan, isu utama yang harus diselesaikan Pemerintah bukan sekadar menambah jumlah bangunan fisik. Melainkan pemerataan akses dan kesejahteraan tenaga pendidik. "Jangan sampai penambahan kampus baru justru semakin membebani anggaran pendidikan dan mempersempit peluang lulusan dari perguruan tinggi umum," ungkap Feriyansyah kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/2/2026). Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Feriyansyah mengenai rencana Pemerintah membangun 10 kampus baru pada tahun ini, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Bukti Presiden Perhatian Besar Pada Pendidikan



“Perlu dikaji mendalam mengenai opsi, apakah melalui bentuk akuisisi, penggabungan atau merger universitas yang sudah ada, atau pilihan terakhir baru mendirikan perguruan tinggi baru.”

Bagaimana Anda melihat rencana Presiden Prabowo Subianto membangun sepuluh perguruan tinggi baru pada tahun ini?

Tentu kami merasa senang karena Presiden juga menaruh perhatian besar hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Presiden memang sangat menaruh perhatian pada masa depan bangsa yang sangat tergantung pada pendidikan.

Konkret kepeduliannya seperti apa? Beliau memiliki skema pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dengan membuka Sekolah Rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang berada di desil satu sampai empat. Presiden menyadari bahwa banyak anak Indonesia yang unggul dan pintar. Maka dari itu, beliau memfasilitasi mereka melalui Sekolah Garuda. Tujuannya agar mereka lebih mudah berkembang, bahkan memiliki akses yang lebih luas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi berkualitas internasional di masa depan. Namun, jika memang ada rencana membuka 10 Perguruan Tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya.

Hal apa saja yang harus diperhatikan bagi Pemerintah sebelum mendirikan kampus baru tersebut? Perlu dikaji mendalam mengenai opsi, apakah melalui bentuk akuisisi, penggabungan atau merger universitas yang sudah ada, atau pilihan terakhir baru mendirikan perguruan tinggi baru. Ini harus diputuskan dengan sangat matang agar tidak kontraproduktif.

Memang saat ini kondisi kampus di Indonesia seperti apa? Fakta di lapangan menunjukkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, jumlahnya sangat banyak. Data terbaru me-

nyebutkan angkanya berkisar antara 2.937 hingga lebih dari 4.600, bahkan ada laporan tertentu yang menyebut angka mencapai 6.484 kampus.

Apakah jumlah kampus tersebut termasuk banyak? Indonesia memiliki jumlah universitas tiga kali lebih banyak daripada China, padahal populasi China lima kali lebih besar dari kita. Artinya, Indonesia tidak kekurangan jumlah institusi secara kuantitas.

Lantas, apa catatan Anda kepada Pemerintah sebelum mendirikan 10 perguruan tinggi baru? Masalah kualitas dan akreditasi. Dari ribuan kampus yang kita miliki saat ini, faktanya hanya sedikit yang sudah terakreditasi unggul. Inilah yang harus menjadi fokus utama, bagaimana meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi yang sudah ada agar benar-benar kompetitif. ■ **UMH**

FERIYANSYAH, Kepala Bidang P2G

Pemerataan & Kesejahteraan Dosen Lebih Mendesak



“Tanpa adanya jaminan keterjangkauan biaya dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, pembangunan kampus baru hanya akan menjadi beban tambahan bagi anggaran.”

Bagaimana Anda melihat rencana Pemerintah membangun sepuluh perguruan tinggi baru pada tahun ini?

Sebenarnya membangun perguruan tinggi ini terkait kemudahan akses, terutama di daerah-daerah baru dan wilayah terluar. Pertumbuhan perguruan tinggi negeri harusnya berkorelasi dengan kemudahan akses. Namun selama ini yang terjadi adalah biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang cukup tinggi, sehingga menghambat anak-anak lulusan sekolah menengah untuk mengakses pendidikan tinggi.

Menurut Anda, seperti apa kondisi perguruan tinggi saat ini? Saat ini kampus-kampus didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yang secara keuangan harus mandiri. Dan pakainya, mereka butuh pemasukan mandiri yang besar dan banyak kampus akhirnya hanya mengandalkan

UKT untuk mendapatkan pemasukan. Hal ini belum diimbangi dengan optimalisasi peran kementerian terkait.

Apakah penambahan kampus baru akan berdampak pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta? Perguruan tinggi swasta (PTS) sekarang mengalami kendala besar karena PTN BH membuka jalur mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, banyak PTS yang tidak mendapatkan mahasiswa atau jumlah pendafatnya sangat sedikit.

Anda tadi menyinggung juga soal pemerataan akses, lantas jika Pemerintah ingin membangun 10 kampus baru, di mana lokasi yang tepat? Terutama di daerah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi baru atau provinsi yang perguruan tingginya masih sangat terbatas. Jangan berpusat lagi pada perguruan tinggi di kementerian lain yang justru

akan sangat membebani anggaran pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Presiden juga menjelaskan, bahwa 1 dari 10 perguruan tinggi baru akan difokuskan pada ilmu pemerintahan, apa tanggapan Anda?

Ya sebenarnya kami sudah ada ilmu pemerintahan seperti IPDN dan yang lainnya. Jika Pemerintah fokus ke ilmu pemerintahan, padahal banyak prodi-prodi di luar ilmu pendidikan itu juga bisa dikaryakan dalam pemerintahan.

Selain soal bangunan fisik dan akses, adakah hal lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah? Isu kesejahteraan dosen harus diperhatikan oleh Pemerintah. Ini masih menjadi masalah utama yang terus disuarakan oleh teman-teman di sekitar pekerja kmpes maupun kami di P2G. Kesejahteraan guru dan dosen saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan di Indonesia. ■ **NNN**